



Ombudsman Temukan Penyalahgunaan Surat Miskin

Dinas Pendidikan se-DIY cegah maladministrasi penerimaan siswa baru.

Iqbal Muhtarom
 miqbal@tempo.co.id

SEMARANG — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menemukan penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu oleh orang tua dari kalangan keluarga mampu agar anaknya dapat diterima di sekolah favorit. Penyalahgunaan SKTM ini diduga memicu diskriminasi dan ketidakadilan karena calon peserta didik yang nilainya tinggi tergeser oleh calon peserta didik dengan nilai yang lebih rendah tapi memiliki SKTM.

Di samping itu, Ombudsman menemukan banyak dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018. Temuan itu didasari aduan yang diterima posko pengaduan dan pengawasan PPDB di beberapa daerah di Jawa Tengah secara langsung.

"Kami masih menemukan praktek-praktek di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, utamanya disebabkan karena perbedaan penafsiran terhadap peraturan," kata pejabat pelaksana tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, kemarin.

Padahal, menurut Sabarudin, pemahaman satuan pendidikan terhadap peraturan dan ketentuan dalam proses pelaksanaan PPDB tahun 2017 punya peranan penting. Hal itu untuk menghindari kesulitan dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan ke-

tentuan yang ada," kata Sabarudin.

Ombudsman menemukan legalisasi kartu keluarga dan akta kelahiran masih dianggap sebagai keharusan. Padahal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyebutkan tak perlu menandatangani syarat itu. Hal itu sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Peningkatan Mutu se-Jawa Tengah.

Selain itu, Ombudsman menemukan kurangnya pemahaman satuan pendidikan terhadap ketentuan rayonsasi yang dikecualikan bagi anak pegawai negeri, anggota TNI,

dan anggota Polri yang melakukan pendaftaran di satuan pendidikan di tempat kedua orang tuanya ditugaskan. Rayonsasi yang dimaksud adalah ketentuan sesuai surat penugasan orang tua yang isinya calon peserta didik diberikan kuota sebesar 5 persen.

Di Yogyakarta, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY bersama Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan empat kabupaten, yakni Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo menandatangani Komitmen Penyelenggaraan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2017/2018 yang Bersih dan Bebas Mala Administrasi kemarin.

Penandatanganan komitmen bersama itu baru pertama kali

dilakukan dengan melibatkan dinas pendidikan. Penyelenggaraan PPDB di DIY untuk tingkat SD, SMP, dan SMA baru dimulai sesuai cuti bersama Lebaran mendatang. "Sekarang pengawasan PPDB melibatkan dinas. Untuk memastikan tidak ada pelanggaran lagi," kata Kepala Ombudsman Perwakilan DIY, Budi Masturi.

Pada tahun sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya pungutan biaya pendaftaran dan daftar ulang dalam proses PPDB. Adapun setelah PPDB yang pernah dilakukan adalah adanya intimidasi yang dilakukan guru wali murid terhadap muridnya yang tidak mampu melunasi sejumlah biaya.

● ERI FASOL | FOTO AGUSTIN RUDIANA

-Dinas Pendidikan *Netral*
 Biasa
 Untuk Diketahui

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,
 Pjt. Kepala
 Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005